

---

## **PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 7 KEDIRI DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK**

**\*Djoko Susanto<sup>1)</sup>, Mashuri<sup>2)</sup>, Fauziah Hanum<sup>3)</sup>**

- 1) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kediri Indonesia
- 2) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kediri Indonesia
- 3) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kediri Indonesia

\*Email Korespondensi : [djokosusanto@unik-kediri.ac.id](mailto:djokosusanto@unik-kediri.ac.id)

---

### **Abstrak**

Keberadaan Komite sebagai wakil masyarakat, oleh karena itu keanggotaannya terdiri dari berbagai unsur masyarakat yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016). Komite mempunyai tugas dan fungsi sebagai pemberi pertimbangan, membantu penggalangan dana dan melakukan kontrol terhadap sekolah. Memahami karakter permasalahan sebagaimana tersebut diatas, yang menuntut data dan jawaban deskriptif dan maka untuk dapat menjawabnya digunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengedepankan datanya diperoleh dari observasi dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian diuji dengan uji validasi data (keabsahan data/triangulasi), yang kemudian dianalisis dengan analisis interaktif. Hasil penelitian adalah sebagai berikut : a. Memberikan pertimbangan kepada kepala sekolah melalui rapat-rapat atau pertemuan komite, b. melakukan penggalangan dana guna untuk kepentingan sekolah sepanjang yang menjadi kewenangan komite, c. menampung dan meneruskan saran atau kritik yang membangun kepada pihak sekolah, dan d. melaksanakan fungsi kontrol terhadap pengelolaan.

**Kata Kunci:** Komite Sekolah; Tugas dan fungsi; Partisipasi

### **Abstract**

*The existence of the Committee as a representative of the community, therefore its members consist of various elements of society that are expected to participate in school management (Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 75 of 2016). The committee has a duty and function to provide consideration, help raise funds, and exercise control over the school. Understanding the character of the problem as mentioned above, which demands descriptive data and answers and so to be able to answer it, a qualitative approach is used, which is a research approach that puts forward the data obtained from observations and interviews. The*

*data obtained were then tested with data validation tests (data validity/triangulation), which were then analyzed by interactive analysis. The results of the study are as follows: a. Providing considerations to the principal through meetings or committee meetings, b. do fundraising for the benefit of the school as long as that is the authority of the committee, c. accommodate and forward constructive suggestions or criticism to the school, and d. carry out control functions over management.*

**Keywords:** *School Committee; Duties and functions; Participations*

## **PENDAHULUAN**

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas sekolah. Hal ini disebabkan karena masyarakat memiliki fungsi kontrol terhadap kegiatan pembelajaran dan pendidikan disekolah. Oleh karena itu, antaralembaga pendidikan (sekolah) dengan masyarakat dan negara atau pemerintah harus berjalan bersama-sama karena maju mundurnya pendidikan secara makro maupun secara mikro menjadi tanggung jawab bersama. Misalnya berbagai kebijakan pendidikan secara makro perlu campur tangan pemerintah dan masyarakat, misalnya mengatasi masalah kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, kriminalitas dan sebagainya.

Partisipasi masyarakat sebagai salah satu komponen tanggung jawab terhadap pendidikan diwujudkan dalam bentuk organisasi yang dinamakan komite. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tersebut, yang berisi:

1. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
2. Menggalang dana dan memberdaya pendidikan lainnya dari masyarakat.
3. Mengawasi/mengontrol pelayanan pendidikan di sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 sebagaimana pasal 1 sampai 4 maka komite sekolah merupakan

bagian yang sangat vital dalam pengelolaan sekolah, sebab komite sekolah yang merupakan lembaga mandiri memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai pertimbangan, penggalangan dana untuk kepentingan kemajuan sekolah, fungsi kontrol dan perpanjangan tangan masyarakat dalam melakukan fungsi kontrol tersebut.

Demikian juga halnya tugas dan fungsi komite sekolah yang ada di SMA Negeri 7 Kota Kediri permasalahannya sekarang adalah bagaimana partisipasi komite dalam kaitannya dengan memajukan kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Kota Kediri, mengingat tugas pokok dan fungsi komite sebagaimana tersebut diatas.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pengertian partisipasi menurut Sutarto dalam Yulianti (2006) adalah Turut sertanya seseorang baik secara langsung maupun emosional untuk memberikan sumbangan-sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi seseorang yang bersangkutan melaksanakan akan tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Menurut Suryosubroto (2006: 71) partisipasi adalah “hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta”. Pendapat di atas dipertegas oleh Keith Davis dalam Suryosubroto (2006: 71) bahwa partisipasi adalah “keterlibatan mental dan pikiran individu di dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan tujuan kelompok tersebut”.

Bryan dan White dalam Yulianti (2006) bahwa bentuk sumbangan seseorang dalam partisipasinya adalah:

1. Partisipasi buah pikiran
2. Partisipasi harta dan uang
3. Partisipasi tenaga atau gotong-royong
4. Partisipasi sosial
5. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi

dan otonomi yang ada (Muzaqi et al., 2020). Dalam rangka memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah, partisipasi Komite sekolah adalah sebagai berikut:

1. Memberi pertimbangan (advisory agency) dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah, serta menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan.
2. Mendukung (supporting agency), kerja sama sekolah dengan masyarakat, baik secara financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Mengontrol (controlling agency) kerja sama sekolah dengan masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan output.
4. Mediator antara sekolah, pemerintah (eksekutif), dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD/ legislatif), dengan masyarakat.

Lain halnya dengan pendapat Heru Sukoco (2009: 55) menyebutkan ada 4 peranan komite sekolah yaitu :

1. Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah. :
2. Memobilisasi dukungan masyarakat dalam hal anggaran pendidikan
3. Mengkoordinasikan dukungan masyarakat dalam hal anggaran pendidikan.
4. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan masyarakat dalam hal anggaran pendidikan.

Menurut Depdiknas (2004: 33-34) menjabarkan mengenai fungsi komite sekolah dalam pendidikan adalah sebagai berikut : a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. b. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. c. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. d. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. f. Melakukan kerjasama dengan masyarakat. g. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

1. Menurut Depdiknas dalam Heru Sukoco (2009: 53) menjelaskan bahwa sesuai dengan peran dan fungsinya Komite sekolah melakukan akuntabilitas sebagai

berikut: Komite sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholders secara periodic, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.

2. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun barang bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintahan setempat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi Komite sekolah dalam pendidikan mereka harus mampu melaksanakan berbagai macam bentuk partisipasi atau kinerja yang telah diberikan supaya dapat menyentuh aspek pendidikan daam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui desentralisasi pendidikan maka pengelolaan pendidikan khususnya jenjang SMA/SMK antar Kabupaten/kota diwilayah provinsi (Suwarno et al., 2020). Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pembiayaan pendidikan masih berjalan seperti sebelumnya. Hal ini karena harus disadari bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang sehingga memotivasi masyarakat untuk memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan (Ali, 2017). Keberhasilan pendidikan di suatu sekolah tidak hanya di tentukan oleh proses pendidikan di sekolah dan tersedianya sarana dan prasarana saja, tetapi juga di tentukan oleh lingkungan keluarga dan/atau masyarakat. Orang tua dan masyarakat juga mempunyai tanggung jawab bersama untuk berpartisipasi, turut memikirkan dan memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Ali, 2017 : 194).

Dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat (komite), sekolah harus dapat membina kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Proses interaksi edukatif di sekolah merupakan inti dari proses pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, bentuk desentralisasi pendidikan yang paling mendasar adalah yang dilaksanakan oleh sekolah, dengan menggunakan komite sekolah sebagai wadah pemberdayaan partisipasi serta masyarakat sebagai proses pelaksanaan layanan pendidikan secara nyata di dalam masyarakat (Baedowi, 2015).

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No 20 tahun 2003 Pasal 56 (3) menyatakan bahwa komite sekolah/madrasah dibentuk sebagai lembaga independen dan berperan dalam meningkatkan kualitas layanan, dengan mempertimbangkan staf, infrastruktur dan pengawasan pendidikan di tingkat unit pendidikan. Mendasarkan pada UUSPN tersebut dapat dideskripsikan bahwa komite sekolah itu dibentuk sebagai lembaga independen yang memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta melakukan fungsi kontrol. Jadi komite sekolah harus dapat meyakinkan orang tua, pemerintah daerah, komunitas bisnis, dan seluruh komunitas bahwa sekolah dapat dipercaya.

Pengelolaan sekolah ini dijalankan dengan asas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas artinya dalam pengelolaan sekolah dewan pendidikan khususnya kepala sekolah bekerja sama dengan masyarakat sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan wadah yang bisa dipakai oleh masyarakat sekolah untuk mengemban amanat tersebut. Wadah tersebut adalah Komite Sekolah. Sebagaimana di jelaskan oleh (Tambunan, 2011) bahwa dalam MBS memberikan otonomi luas pada tingkat sekola dan melibatkan masyarakat dalam rangka mengeluarkan kebijakan pendidikan (Thieme et al., 2013)

Keberadaan komite sekolah harus didasarkan pada partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan dan hasil pendidikan di unit / unit pendidikan. Karena itu, ketika membentuk komite sekolah, perhatian harus diberikan pada distribusi peran sesuai dengan posisi dan otonomi yang ada. Peran komite sekolah adalah

1. Sebagai lembaga donor. Pertimbangan (pusat saran) dalam definisi dan implementasi kebijakan pendidikan di unit pendidikan.
2. Sebagai agen pendukung (agensi pendukung), baik dalam tugas keuangan, mental maupun administrasi pribadi di unit pengajaran.
3. Sebagai Pengendali (Controlling Agency) dalam konteks transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dan mengeluarkan pendidikan dalam pelajaran.
4. Sebagai lembaga perantara antara pemerintah (eksekutif) dan masyarakat dalam satuan pendidikan.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, keanggotaan Komite Sekolah terdiri dari :

1. Elemen komunitas dapat berasal dari orang tua / wali siswa. Tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; Dunia bisnis / industri; organisasi profesional staf pendidikan; Perwakilan alumni; dan perwakilan siswa.
2. Anggota Dewan Pengajar, yayasan / lembaga pendidikan yang menggunakan dewan desa, juga dapat dimasukkan sebagai anggota dewan sekolah (maksimal 3 orang).
3. Setidaknya ada sembilan anggota komite sekolah dan jumlahnya aneh.
4. Komite sekolah setidaknya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, yang dipilih oleh dan dari anggota. Ketua bukan dari kepala unit pendidikan.
5. Sinergi antara komite sekolah dan sekolah menciptakan tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra dalam pengembangan pendidikan. Dari sini, komunitas dapat menyalurkan berbagai gagasan dan berpartisipasi dalam mempromosikan pendidikan di wilayah tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Memahami karakter permasalahan sebagaimana tersebut diatas, yang menuntut data dan jawaban deskriptif dan maka untuk dapat menjawabnya digunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengedepankan datanya diperoleh dari observasi dan wawancara. Agar data dapat dikumpulkan maka digunakan teknik penentuan informan secara purposif sampling yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan kedalaman penguasaan tentang masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi partisipasi, wawancara mendalam dan untuk melengkapi keakuratan data digunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Setelah data terkumpul dilakukan uji validasi data dan kemudian dilanjutkan dengan analisis data melalui teknik analisis interaktif Miles Huberman (Sugiyono:2012)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Partisipasi dalam Pemberian Pertimbangan dan Dukungan**

Dalam pengelolaan sekolah, sekolah dilengkapi oleh keberadaan komite sekolah yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat. Artinya dalam pengelolaan sekolah tidak

sendirian, namun ada lembaga lain yang bertugas untuk memberikan pertimbangan sebelum kepala sekolah membuat suatu keputusan sekolah, yaitu Komite. Oleh karena itu keputusan yang ditetapkan nantinya sudah tentu merupakan keputusan bersama antara pihak sekolah dengan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh komite.

Partisipasi Komite dalam memberikan pertimbangan antara lain melalui rapat anggaran, rapat penerimaan siswa baru, rapat tentang studi banding ke perguruan tinggi negeri sebagai orientasi siswa kelas 3 yang akan melanjutkan studi lanjut, rapat wali murid. Semua itu dilakukan sekolah dengan melibatkan komite dan komite wajib memberikan pertimbangan kepada sekolah. Hal ini bernuansa legalitas dalam Kepala sekolah menjalankan berbagai kebijakan sekolah. Oleh karena itu kedudukan komiten menjadi sangat penting dalam sekolah. Kegiatan berbagai rapat sebagaimana dijelaskan di atas relatif rutin dan sudah terjadwal setiap tahunnya. Suasana rapat berjalan tertib dan lancar karena dijiwai semangat menjalankan kemitraan, sekolah juga menyambut baik berpartisipasi aktif pengurus komite sekolah dalam pelaksanaan program sekolah selama ini.

Kelancaran pelaksanaan program sekolah di tahun 2018 / 2019 sangat memerlukan dukungan dari komite sekolah tidak saja secara material pendanaan, tapi juga secara non material. Kepala sekolah SMA Negeri 7 Kota Kediri meningkatkan partisipasi serta pengurus komite sekolah dengan cara meningkatkan komunikasi dua arah. Melalui komunikasi ini diharapkan pengurus komite sekolah dapat lebih memahami sasaran yang ingin dicapai sekolah dan anak didik, dan selanjutnya berusaha lebih keras untuk membantu terlaksananya kegiatan sekolah.

Pengurus komite sekolah semaksimal mungkin dalam menjalin komunikasi dua arah dengan orang tua siswa. Melalui komunikasi dua arah komunikasi diharapkan efektif. Komite sekolah menjadi penampung aspirasi orang tua berupa pengaduan, keluhan maupun saran terhadap kebijakan dan program yang dijalankan oleh SMA Negeri 7 Kota Kediri.

Komite di SMA Negeri 7 Kediri juga selalu memberikan support atau motivasi kepada siapa saja yang ada dan bergabung di struktur organisasi sekolah. Support dimaksud agar semangat untuk maju terus tertanam di seluruh komponen sekolah dalam



rangka mencapai prestasi. Baik itu diberikan kepada siswa yang mau berangkat bertanding atau berlomba ataupun juga kepada guru yang mengikuti workshorp. Melalui pemberian support tersebut diharapkan dapat berjuang dan mengikuti secara serius dalam rangka memajukan sekolah (Pramono et al., 2020).

Setiap tahun sekolah juga melakukan acara wisuda lulusan dan pelepasan, dan hal tersebut tidak ada dalam anggaran sekolah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi komite, yaitu melakukan penggalangan dana untuk kegiatan tersebut sekaligus sebagai ajang silahturohmi dengan kawan-kawan. Penggalangan dana dimanfaatkan dan dilaksanakan secara maksimal, tertib hukum dan disiplin, transparansi harus dilakukan.

### **Partisipasi Komite dalam bidang Keorganisasian dan Kontroling**

Dalam mewujudkan kopmite untuk memajukan sekolah, maka partisipasi diawali dengan menyusun program kerja komite, rapat program kerja, rapat teknis komite tentang tahapan-tahapan pencapaian, dan mencarikan solusi terhadap berbagai kendala di lapangan. Partisipasi yang lain dalam bentuk : (1) sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*); (2) sebagai pendukung (*supporting agency*); (3) sebagai pengontrol (*controlling agency*); dan (4) sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat khususnya untuk memajukan kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Kediri, misalnya informasi tentang bantuan dana BOS, hal ini dinformasikan ke orang tua siswa melalui rapat terbuka komite. Melalui hal yang demikian diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dan sifatnya terbuka, artinya siapa saja bisa bertanya tentang penggunaan dana BOS.

Demikian juga tentang adanya dana partisipasi orang tua, khususnya bagi orang tua siswa tahun pertama atau kelas 10. Hal ini sangat penting karena Komite membantu sekolah dalam penggalangan dana. Walaupun komite memiliki kewenangan untuk menggalang dana namun itu semua harus juga persetujuan orang tua. Transparansi penggunaan dana partisipasi menjadi sangat penting untuk menentukan keberhasilan penggalangan dana. Imbalannya sekolah harus mengalami kemajuan, baik dibidang akademik maupun di bidang olahraga, seni dan lain sebagainya.

Agar jalannya keorganisasian sekolah tidak menyimpang atau melakukan kesalahan dan pelanggaran organisasi, maka harus dikontrol atau diawasi. Kemudian

tugas pengawasan tersebut dilakukan oleh Komite. Bentuk pengawasan atau kontrol komite SMA Negeri 7 Kediri adalah dengan memberingatan peringatan, warning atau pertimbangan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.

### **Kendala Komite dalam Berpartisipasi di Sekolah**

Kendala sekolah dalam upaya memperdayakan komite sekolah yaitu kehadiran komite sekolah yang belum lengkap dalam pelaksanaan rapat, adanya keterlambatan dari pengurus komite sekolah ketika mengikuti rapat. Dari faktor internal yaitu masih belum meratanya pemahaman pengurus dan anggota komite sekolah tentang kedudukan, partisipasi, dan fungsi Komite Sekolah. Faktor eksternal yaitu dari lingkungan sekitar sekolah yang kurang mengerti dan memahami mengenai fungsi Komite Sekolah. Kendala dari pihak sekolah adalah masih belum maksimalnya sosialisasi tentang partisipasi Komite Sekolah kepada masyarakat belum efektif.

Kendala lain yaitu faktor internal dari pengurus komite sekolah dimana belum meratanya pemahaman pengurus komite sekolah mengenai manajemen pendidikan yang berkaitan dengan program sekolah di SMA Negeri 7 Kota Kediri, keterbatasan waktu yang dimiliki pengurus komite sekolah sehingga tidak bisa secara kontinyu untuk memantau program sekolah secara keseluruhan. Belum maksimalnya partisipasi serta pengurus komite sekolah dalam memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan dengan menggandeng orang tua dan pihak swasta karena belum maksimalnya sosialisasi yang diberikan.

Mengingat komite juga memiliki pekerjaan dan tanggung jawab lain, maka terkadang anggota komite tidak bisa hadir dalam pertemuan. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak bisa maksimalnya setiap ide atau laporan pekerjaan. Akibat selanjutnya adalah ide-ide, saran tidak bisa diutarakan secara langsung oleh pengurus komite sekolah yang berhalangan hadir.

Masih belum maksimalnya partisipasi komite untuk membantu dalam pencarian sumber dana guna meningkatkan pembangunan. Hal ini lebih disebabkan karena anggota komite merupakan pribadi yang juga memiliki pekerjaan yang juga harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab.

Kendala yang dihadapi komite sekolah dalam memberdayakan dirinya sendiri di SMA Negeri 7 Kota Kediri yaitu masih belum maksimalnya integritas dari pengurus maupun anggota komite sekolah, tidak semua dapat menghadiri rapat / pertemuan yang dilakukan oleh komite sekolah.

Kendala lain yang masih dihadapi komite sekolah yaitu dalam melaksanakan fungsi dan partisipasinya terhadap program sekolah masih sebagai pemberi pertimbangan dan pengawasan, sedangkan untuk partisipasinya sebagai pendukung dan mediator belum sepenuhnya dilaksanakan.

Kehadiran Komite tidak hanya sekedar sebagai organisasi yang khusus memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh komite sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Upaya sekolah dalam memperdayakan komite sekolah di SMA Negeri 7 Kota Kediri yaitu dengan mengadakan rapat rutin sekolah dengan pengurus komite sekolah, memfungsikan komite sekolah secara aktif dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan program sekolah, antara lain: ikut aktif menyusun rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) dan evaluasi program sekolah. Komite sekolah di SMA Negeri 7 Kota Kediri merupakan komite sekolah yang proaktif dalam mendukung peningkatan kualitas sekolah.

Upaya komite untuk meningkatkan kinerjanya melalui perencanaan, pertemuan atau rapat anggota komite, action langsung lapangan dalam hal memotivasi siswa dan rapat-rapat dengan sekolah. Kendala sekolah dalam upaya memperdayakan komite sekolah yaitu kehadiran komite sekolah yang belum lengkap dalam pelaksanaan rapat, belum meratanya pemahaman pengunis dan anggota komite sekolah tentang kedudukan, partisipasi, dan fungsi Komite Sekolah, keterbatasan waktu yang dimiliki pengurus

komite sekolah sehingga tidak bisa secara kontinyu untuk memantau program sekolah secara keseluruhan dan belum maksimalnya partisipasi serta pengurus komite sekolah dalam memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan dengan menggandeng orang tua dan pihak swasta karena belum maksimalnya sosialisasi yang diberikan. Belum bisa maksimal anggota komite dapat menghadiri rapat yang diadakan sekolah, karena suatu kesibukan pekerjaan.

## **Saran**

1. Disarankan kepada sekolah agar selalu membina hubungan baik dengan komite, mengingat kemajuan sekolah tidak dapat dicapai tanpa partisipasi komite.
2. Disarankan kepada komite agar membina komunikasi yang seluas-luasnya mengingat tugas pokok dan fungsi yang sangat besar atas keberhasilan sekolah.
3. Disarankan kepada orang tua siswa untuk bisa menerima apa yang diprogramkan oleh sekolah dan komite dalam rangka mencapai keberhasilan sekolah.

## **REFERENSI**

- Ali, Muhammad. 2017. *Kebijakan Pendidikan dan Menengah dalam Perspektif Government di Indonesia*, Malang : CCB. Press.
- Baedowi, Ahmad. 2015. *Manajemen Sekolah Efektif : Pengalaman Sekolah Sukma Bangsa*, Jakarta : PT. Pustaka Alvabeta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Depdiknas. (2004). *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*. Jakarta: Depdiknas Dikdasmen.
- Direktorat Tenaga Kependudukan. 2008. *Pendekatan, Jenis dan Penelitian, Pendidikan*, Jakarta : Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara.

Heru Sukoco. 2009. *Peran Manajerial Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri 2 Biak Kota Provinsi Papua*. Tesis Magister, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta.

Kemendiknas Nomor 044 / U / 2002 tentang Komite Sekolah.

Muzaqi, A. H., Pratama, M. R., & Widodo, S. (2020). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Netra Melalui Kebijakan Inklusif. *Journal Publicuho*, 3(3), 381–393.

Pramono, T., Suwarno, S., & Widodo, S. (2020). Strategi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Untuk Mencapai Program Kerja Organisasi Di Universitas Kadiri. *Mediasosian*, 4(1).

Suwarno, S., Widodo, S., Pramono, T., & Bramantyo, R. Y. (2020). Peningkatan Kinerja Guru SMA Negeri di Kota Kediri dalam Perspektif Ujian Nasional. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 14(1), 43–50.

Tambunan, T. T. H. (2011). 'Indonesia: Building an Inclusive Development Mode', in Zhang, Y., F. Kimura and S. Oum (eds.), *Moving Toward a New Development Model for East Asia- The Role of Domestic Policy and Regional Cooperation*. In *ERIA Research Project Report*. ERIA.

Thieme, C., Prior, D., & Tortosa-Ausina, E. (2013). A multilevel decomposition of school performance using robust nonparametric frontier techniques. *Economics of Education Review*, 32, 104–121.

Yulianti. 2006. *Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan dan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur*